



PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DESA (SID) BERBASIS WEB DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN EXCELLENT DI DESA GROBOGAN KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG

Nur Ali

STIE PGRI Dewantara Jombang

Email: nurali@stiedewantara.ac.id

Abstract

The web-based Village Information System (SID) is one of the tools for village officials in providing services to village communities as part of the implementation of e-government as stated in the mandate of Law Number 6 of 2014. SID is used to resolve problems that often arise when village data management such as village data administration, correspondence data management, and village population data. Apart from that SID can be used by village officials to support village officials' decision making and as input in village development planning. It is hoped that this system can be used by villages to form good village governance. This system is also expected to provide innovation for village government offices to improve the performance of village officials in terms of quality of service to the community including related to productivity, responsiveness, and responsibility.

Abstrak

Sistem Informasi Desa (SID) berbasis web adalah salah satu alat bantu bagi aparatur desa dalam memberikan layanan kepada masyarakat desa sebagai bagian dari implementasi e-government sebagaimana tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. SID digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kerap muncul ketika pengelolaan data desa seperti administrasi data desa, pengelolaan data surat menyurat, serta data kependudukan desa. Selain itu SID dapat digunakan oleh aparatur desa untuk mendukung pengambilan keputusan aparatur desa serta sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan desa. Sistem ini diharapkan dapat digunakan oleh desa sehingga terbentuk tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Sistem ini juga diharapkan dapat memberikan inovasi bagi kantor pemerintahan desa untuk dapat meningkatkan kinerja aparatur desa ditinjau dari segi kualitas pelayanan terhadap masyarakat antara lain terkait dengan produktivitas, responsivitas, dan responsibilitas.

Pendahuluan

Kebijakan pedesaan saat ini menjadi inti diskusi kebijakan di banyak negara di seluruh dunia dalam upaya untuk mengatasi dan secara efektif mendukung kebutuhan dan peluang spesifik daerah pedesaan dan penduduknya di era baru. Pembangunan pedesaan merupakan agenda penting pemerintahan saat ini, seperti yang tertuang dalam salah satu butir Nawa Cita yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Article History

Received: 24 Januari 2024

Reviewed: 29 Januari 2024

Published: 30 Januari 2024

Key Words

Village Information System, Village Apparatus, Good Governance

Sejarah Artikel

Received: 24 Januari 2024

Reviewed: 29 Januari 2024

Published: 30 Januari 2024

Kata Kunci

Sistem Informasi Desa, Aparatur Desa, Good Governance



Desa sebagai pemerintahan administratif terkecil di Indonesia (Asyikin, Fitri dan Nugroho, 2015) yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari pemerpapan *e-government* di Indonesia (Mayowan, 2016), dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengelola administrasi data kependudukan desa.

Munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi angin segar bagi desa dapat secara otonom mengelola data yang ada di desa. Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tertuang dalam pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan disebutkan:

- 1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkansistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 3) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- 4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- 5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- 6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten /Kota untuk Desa.

Mencermati hal di atas, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Sistem informasi desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan. Data tersebut dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa serta semua pemangku kepentingan.

Pengembangan sistem informasi desa sebagai suatu sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah Desa harus selaras dengan perkembangan sarana dan kapasitas pemerintah desa, dan dipergunakan desa untuk perencanaan desa, melaksanakan akuntabilitas, transparansi dan menyelenggarakan pelayanan publik. Sekaligus, sistem informasi desa yang dikelola desa harus dapat memenuhi kebutuhan pihak supra desa untuk memonitor dan mengevaluasi keadaan dan perkembangan desa. Kepentingan utama desa sendiri akan tata kelola data dan informasi adalah untuk memudahkan pekerjaan perangkat desa dan memudahkan warga dalam mengakses informasi.

Namun dalam mengimplementasikan mandat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ini, bukanlah hal yang mudah karena dalam pelaksanaan mengalami berbagai kendala. Beberapa kendala yang paling sering ditemukan antara lain adalah:



- 1) Masih rendahnya pemahaman SDM dibidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung pekerjaan,
 - 2) Sistem layanan masih menggunakan manual, sehingga ketepatan dan kecepatan layanan masih relative rendah,
 - 3) Tata Kelola pemerintahan desa, terutama yang terkait basis data masih belum optimal.
- Berdasarkan beberapa persoalan di atas, maka menjadi sesuatu yang sangat penting untuk membantu pemerintah desa dalam mewujudkan mandat tersebut diatas melalui kegiatan pendampingan dan pelatihan dengan tujuan akhir terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good government governance*) dan layanan yang *excellent* bagi masyarakat desa dengan tersusunnya sistem informasi desa berbasis web dan sekaligus meningkatnya ketrampilan aparatur desa dalam menjalankan fungsinya untuk melayani masyarakat dengan lebih efektif dan efisien melalui Sistem Informasi Desa (SID).

Metode Penelitian

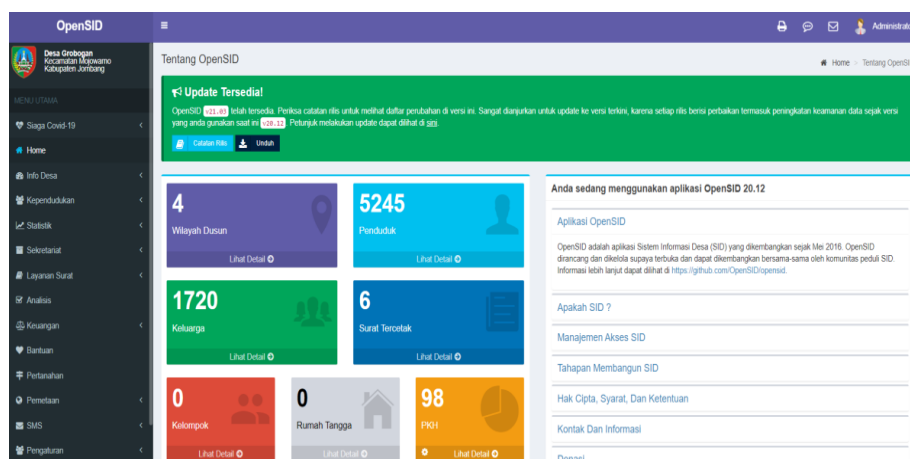
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Grobogan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang difokuskan pada 2 persoalan utama yaitu: 1) sistem informasi desa yang masih manual dan tidak terintegrasi, dan 2) masih rendahnya kemampuan aparatur desa dalam menjalankan sistem informasi desa secara *computerize* berbasis web. Metode yang sangat relevan dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain adalah dengan melakukan pendampingan dan pelatihan.

1) Pendampingan

Kegiatan pendampingan ditujukan kepada khusus pengelola sistem (administrator sistem), yang dimulai dari hosting, pendaftaran domain, instalasi sistem, migrasi dan pengisian database, serta pembagian tugas dan fungsi kepada aparatur desa lainnya dibawah administrator agar sistem bisa berjalan secara berkesinambungan.

2) Pelatihan

Kegiatan pelatihan ditujukan kepada seluruh aparatur desa dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sistem informasi desa (SID) berbasis web. Kegiatan ini dimulai dari pengenalan sistem, fitur-fitur dan fungsinya, cara login, cara menambahkan database kependudukan, cara membikin form baru surat, cara mencetak, dan lain sebagainya.



Gambar 1: Tampilan Laman SID Menggunakan OpenSID



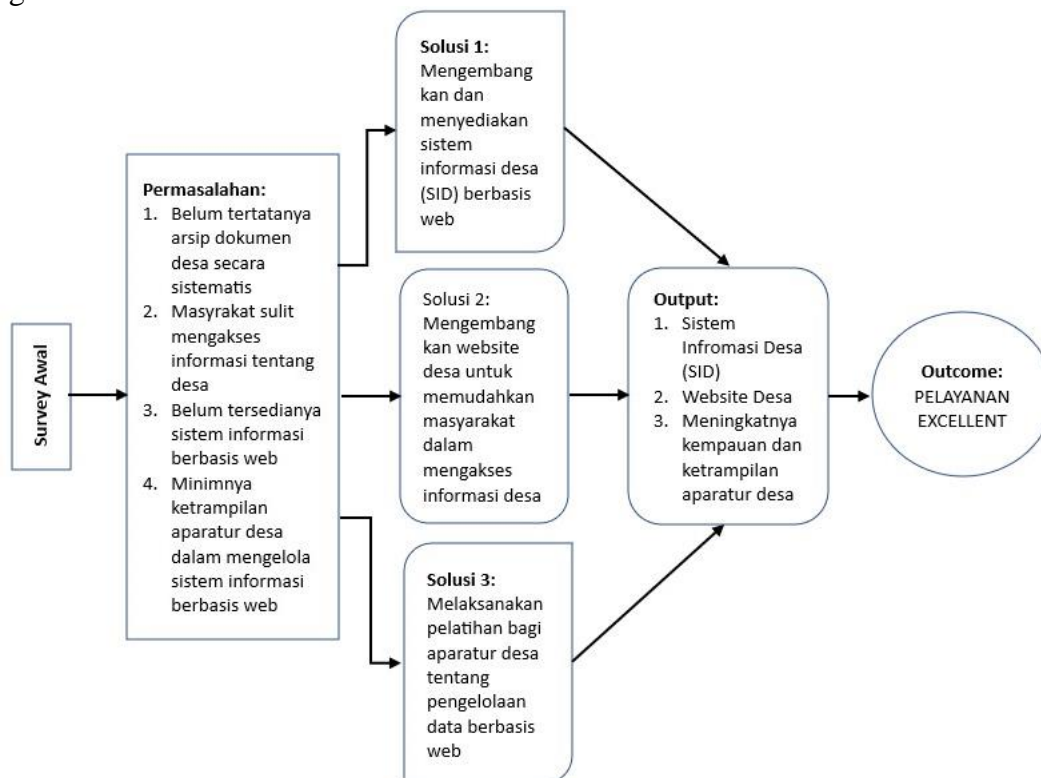
Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Survey Awal

Kegiatan pengabdian di Desa Grobogan Kecamatan Mojowarno diawali dengan survey lapangan dan melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi desa khususnya dalam memberikan layanan administrasi dan tata Kelola pemerintahan desa. Berikut merupakan ringkasan hasil analisis permasalahan, solusi dan metode yang digunakan dalam memecahkan masalah:

No.	Permasalahan	Solusi	Metode
1	Rendahnya sumber daya teknologi pengelolaan data administrasi desa khususnya kependudukan dan	Membuat aplikasi Sistem Informasi Desa	Pendampingan: Instalasi OpenSID
2	Rendahnya pengetahuan SDM desa tentang teknologi terkait SID	Pelatihan infrastruktur dan penggunaan SID	Pelatihan: Presentasi, Praktek langsung, Diskusi

Secara skematis hasil analisis permasalahan dapat digambarkan dalam gambar bagan sebagai berikut:



Gambar 2: Skema analisis permasalahan dan solusinya

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi dilakukan dalam rangka membangun pengetahuan dan pemahaman aparatur desa mengenai Sistem Informasi Desa (SID) dan manfaat-manfaat penerapan SID. Beberapa manfaat penerapan SID antara lain:



- a. Memudahkan pemerintah desa dalam mengakses, menyimpan dan mengolah data desa.
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan terbaru.
- c. Memperluas jangkauan informasi
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa.
- e. Mempermudah akses informasi tentang desa.
- f. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
- g. Menemukan potensi sumber daya yang bisa di optimalkan untuk mendukung kemandirian desa.
- h. Memudahkan desa untuk bekerjasama dengan pihak ketiga.
- i. Meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa.
- j. Mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten.
- k. Memudahkan pemerintah daerah melakukan pemantauan perkembangan desa secara nyata.

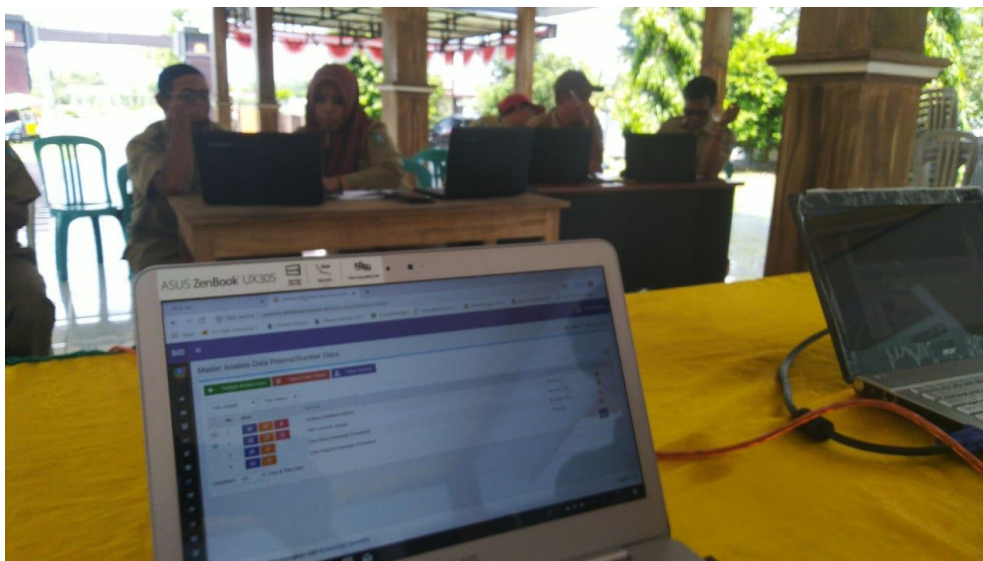


Gambar 3: Sosialisasi Sistem Informasi Desa (SID)

3. Pendampingan Teknis

Pendampingan teknis dilakukan hingga selesai dengan memastikan bahwa program system informasi desa benar-benar dapat dioperasikan dengan baik. Pada tahap ini terdapat berbagai persoalan yang terjadi pada desa pelaksana SID, terdapat bermacam-macam problematika diantaranya,

- a. Ketika import data excel ke system terjadi ketidak-sinkronan;
- b. Database ada yang belum dibackup;
- c. Database ada yang hilang;
- d. Cara memperbarui berita yang ditampilkan;
- e. Dan lain-lain.



Gambar 4: Pendampingan Teknis

4. Evaluasi dan Monitoring

Setelah pendampingan teknis, maka dilaksanakan evaluasi dan monitoring untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Apabila masih terdapat kekurangan maka menjadi catatan bagi pemerintah desa untuk perbaikan kedepannya. Proses pendampingan akan tetap dilakukan sampai benar-benar program pendampingan tercapai sesuai target. Dalam tahap ini merupakan *feedback* dari hasil pendampingan teknis, semua aparatur desa telah dapat mengimplementasikan dengan baik.

Berikut hasil evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan dan implementasi SID di Desa Grobogan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang:

1. Tanggapan disampaikan oleh **Denny Falensi** (Sekretaris Desa):

“Kegiatan pendampingan pengelolaan SID sangat baik, karena dengan adanya pelatihan ini kami selaku perangkat desa merasa terbantu, dan tanggapan dari masyarakat pun baik, karena setelah adanya pelatihan ini kami bisa membuat berita tentang desa yang dimana berita tersebut dapat dibaca oleh masyarakat Desa Grobogan maupun masyarakat luar Desa”.

“Sebelumnya kami pernah mendapatkan sosialisasi tentang SID 3.04, tetapi dalam pelaksanaannya masih *offline* dan sering sekali mengalami error pada saat digunakan, sehingga mengganggu proses pelayanan di desa. Alhamdulillah saat ini setelah adanya pendampingan, SID di Desa Grobogan sudah *online* yang dapat diakses masyarakat luas melalui alamat website www.grobogan-mojowarno.desa.id dan kendala-kendala kami sebelumnya sebagian besar telah teratasi”.

2. Selain itu tanggapan juga disampaikan oleh **Galih Ilmi Aden** (Kaur Perencanaan):

“Sebelumnya kami juga pernah mendapatkan sosialisasi tentang SID 3.04 seperti halnya desa-desa yang lain, tetapi dalam pelaksanaannya masih *offline* dan sering sekali mengalami *error* pada saat digunakan, sehingga mengganggu proses pelayanan di desa. Alhamdulillah saat ini setelah adanya pendampingan, kendala-kendala sebelumnya bisa teratasi karena sudah *online* dan tidak *error* lagi dan pelayanan pada masyarakatpun menjadi lebih lancar”



“Bahwa dengan adanya pelatihan ini kami sangat terbantu dalam hal Kependudukan dan surat menyurat, apalagi dalam aplikasi SID (OpenSID) berbasis web, terdapat berita-berita mengenai pemerintahan desa yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana kondisi di desanya. Selain itu aplikasi SID juga merupakan salah satu cara transparansi desa kepada masyarakat, karena website desa ini tidak hanya mencakup kependudukan dan berita tentang desa saja , untuk data keuangan desa pun ada, yang dimana nanti nya dapat dilihat langsung oleh semua masyarakat masyarakat luas dengan cara mengakses website resmi desa.



Gambar 5: Website Desa Grobogan dan SID Grobogan Mojowarno



Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Grobogan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang berlangsung dengan baik sesuai dengan rencana pengabdian selama kurang lebih 1 bulan. Pada aspek resource sudah berjalan baik, pemenuhan sumber daya untuk implementasi Sistem Informasi Desa sudah tercukupi, hanya saja perlu penguatan dan pendampingan secara konsisten dari Pemerintah Daerah. Dampak dari Implementasi Sistem Informasi (SID) di Desa Grobogan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang yaitu adanya pelayanan administrasi lebih efektif dan efisien, meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, serta program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran.

Daftar Pustaka

Antonio, (2012). Jurnal Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi Informatika (SI-ADIF), *Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura*, ELKHA Vol.4, No.2 – Oktober 2012.

Asyikin, A. N., Fitri, R., dan Nugroho, A. S. B (2015), *Pengukuran Tingkat Kesiapan Kantor Pemerintahan Desa dalam Penerapan Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Perkantoran Desa*, Jurnal Poros Teknik, 7(2), pp, 61-67

Hermansyah, (2015). *Sistem Informasi Efiling Dokumen Desa Berbasis Web Studi Kasus Desa Bangun-Pungging*, *Program Studi Teknik Informatika*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Mayowan, Y. (2016), *Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Desa*, *e-Journal Fakultas Ilmu Administrasi*, Universitas Brawijaya, 10 (1), pp, 14-23

Silvana, M. d. (2015). *Analisis Proses Bisnis Sistem Pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas Kantor Regional II PT. Pos Indonesia*. TEKNOSI, 2476

Tri Sapto. 2016. *Analisis E-Government Terhadap Pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 10. No. 3. November.hlm.281

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah